



Dewan Pesimistis Selesaikan Target Raperda

UMBULHARJO—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja pesimistis mampu menyelesaikan target pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun ini. Alasannya, masa kerja Dewan tahun ini lebih banyak dihabiskan untuk agenda perjalanan dinas.

"Beban kerja di kantor versus hari efektif tidak seimbang," kata salah seorang anggota Dewan yang enggan disebutkan namanya, Rabu (10/1).

Tahun ini DPRD Kota Jogja memiliki target untuk menyelesaikan sebanyak 31 raperda. Dari jumlah tersebut, 19 raperda di antaranya raperda usulan baru tahun ini termasuk tiga raperda soal anggaran, dan 12 raperda luncuran tahun lalu.

Anggota Dewan yang juga pimpinan fraksi salah satu partai politik itu mengungkapkan pesimistisnya itu berdasarkan pengalaman tahun lalu saat pembahasan 30 raperda. Dalam perjalanannya masih tersisa 12 raperda yang belum selesai. Menurut dia, untuk membahas satu raperda membutuhkan waktu sekitar tiga bulan.

Satu angkatan panitia khusus (pansus) pembahasan raperda, kata dia, hanya bisa dua raperda, karena setiap pansus berisi 16 anggota Dewan. Jumlah anggota DPRD Kota

KINERJA DPRD JOGJA



Hari Kerja DPRD Jogja

- Total hari kerja efektif 243 hari selama tahun ini.
- Hari kerja di kantor 74 hari atau sekitar 2,5 bulan.

Kegiatan lapangan

- Kunjungan kerja luar daerah
- Reses
- Bimbingan teknis (Bimtek) dalam DIY.

Beban kerja

- Menyelesaikan 31 raperda.
- Sebanyak 19 raperda di antaranya raperda usulan baru tahun ini termasuk tiga raperda soal anggaran.
- Sebanyak 12 raperda luncuran tahun lalu.

Sumber DPRD Kota Jogja

kerja di kantor," ujar dia.

PP No.18/2017 yang dimaksud adalah PP tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP tersebut sebagai payung hukum kenaikan tunjangan Dewan. Sejak September tahun lalu semua anggota DPRD Kota Jogja menerima kenaikan gaji dari sebelumnya hanya kisaran Rp21 juta menjadi sekitar Rp33 juta.

Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko, sebelumnya mengatakan hari efektif kerja Dewan di kantor tahun ini masih lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu total efektif hari kerja di kantor sebanyak 70 hari, tahun ini 74 hari. Meski demikian ia menyadari banyak tugas Dewan yang harus selesai sesuai target.

Koko, sapaan akrabnya justru khawatir pembahasan raperda tidak sesuai target itu karena tahun ini bertepatan dengan tahun politik menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Menurut dia, agenda politik masing-masing legislator akan mempengaruhi kinerja sebagai anggota Dewan. "Kami akan rapatkan bersama pimpinan semua alat kelengkapan Dewan untuk membuat tata kala kinerja agar tetap sesuai target," kata dia. *(Ujang Hasanudin)*

Jogja sebanyak 40 orang. Dengan demikian, sambungnya, untuk satu pansus hanya bisa membahas dua atau maksimal empat raperda.

Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan, total hari efektif kerja Dewan di kantor hanya 74 hari atau sekitar 2,5 bulan, dari total 243 hari kerja selama tahun ini. Sisanya digunakan untuk kunjungan kerja luar daerah, serta reses dan bimbingan teknis (bimtek) dalam DIY.

Untuk kunjungan kerja, di

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005